

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/I/2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2010-2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Tugas dan fungsi Kemnakertrans diarahkan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas sasaran pembangunan dalam RPJM, yaitu: Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Selain mengakomodasi prioritas pembangunan yang dimuat dalam RPJMN, dokumen Renstra juga memuat tentang kebijakan kementerian dan target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, sebagai acuan untuk perencanaan penganggaran tahunan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kemnakertrans.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2010-2011 telah terjadi berbagai perubahan strategis, di lingkup internal terjadinya perubahan struktur organisasi Kemnakertrans sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur unit kerja. Unit kerja Eselon I Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) berganti nama menjadi Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT). Selain pada tingkat Eselon I, perubahan juga terjadi pada tingkat direktorat, misalnya Direktorat Fasilitas Perpindahan Transmigrasi berubah nama menjadi Direktorat Fasilitas Penempatan Transmigrasi. Dalam lingkup Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan berganti nama menjadi Direktorat Bina Penegakan Hukum. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Produktivitas menjadi Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan.

Di samping itu, juga terjadi perubahan kebijakan di bidang ketransmigrasian dengan diterbitkannya UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang secara prinsip mengatur perubahan pendekatan pembangunan ketransmigrasian.

Dalam penerapan sistem penganggaran juga terjadi perubahan yang diberlakukan sejak tahun 2011, di mana setiap unit kerja Eselon I melaksanakan satu program dan capaiannya terletak pada tingkatan *outcome*.

Adapun indikator yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan pada level ini adalah Indikator kinerja utama. Sedangkan, unit kerja Eselon II melaksanakan satu kegiatan dengan *output* yang terukur. Dengan kata lain, *outcome* yang dicapai oleh unit kerja Eselon I bergantung pada capaian *output* yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon II.

Perubahan strategis eksternal dalam penempatan tenaga kerja ke beberapa negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perkembangan dan tuntutan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga mempengaruhi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dengan adanya perubahan kebijakan di internal-eksternal Kemnakertrans, maka perlu dilakukan *review* terhadap Renstra Kemnakertrans 2010-2014, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran Kemnakertrans.

Proses penyusunan *review* Renstra ini melibatkan seluruh jajaran unit organisasi Kemnakertrans sehingga penyempurnaannya dapat merupakan representasi dari seluruh unit di lingkungan Kemnakertrans sebab dokumen *review* Renstra ini akan menjadi acuan semua unit jajaran Kemnakertrans dalam merencanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 2010-2014.

B. Kondisi Umum

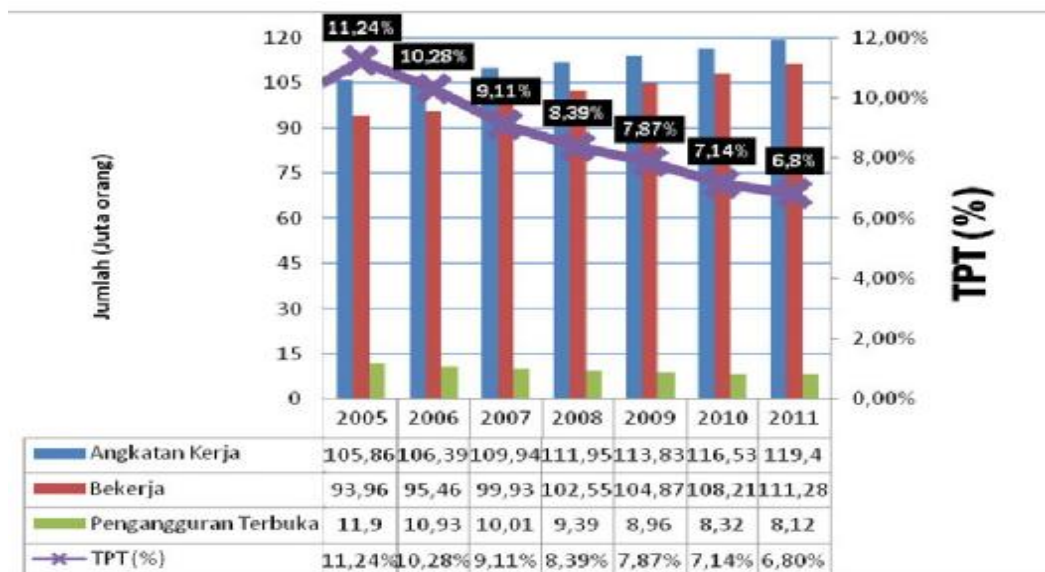
Dalam rangka *review* Renstra Kemnakertrans, maka sesuai peran Kemnakertrans untuk mendukung pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan harus bertolak dari kondisi umum ketenagakerjaan dan kemiskinan secara nasional.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang keadaan ketenagakerjaan sampai dengan Februari 2011, jumlah angkatan kerja di Indonesia sejumlah 119,4 juta orang, bertambah sekitar 3,4 juta orang dibandingkan angkatan kerja bulan Februari 2010 sebesar 116,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 111,3 juta orang,

bertambah 3,9 juta dibandingkan keadaan bulan Februari 2010. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,8 persen atau 8,12 juta orang, mengalami penurunan dibandingkan keadaan bulan Februari 2010 sebesar 7,14 persen atau 8,32 juta orang.

Perkembangan pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 sampai Februari 2011 sebagaimana tergambar dalam grafik I-1.

**GRAFIK I-1.
PERKEMBANGAN PENGANGGUR DI INDONESIA**



TAHUN 2005 – 2011

Sumber : Sakernas BPS (2011)

Dalam perkembangan satu tahun terakhir (Februari 2010–Februari 2011) hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali sektor pertanian dan sektor transportasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 360 ribu orang (0,84 persen) dan 240 ribu orang (4,12 persen). Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan sektor industri secara berurutan menjadi sektor penampung terbesar tenaga kerja.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah tetap mendominasi yaitu sebesar 55,1 juta orang (49,53 persen), Sekolah Menengah Pertama 21,22 juta orang (19,07 persen), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 26,08 juta (23,44 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sebesar 3,3 juta orang (2,98 persen)

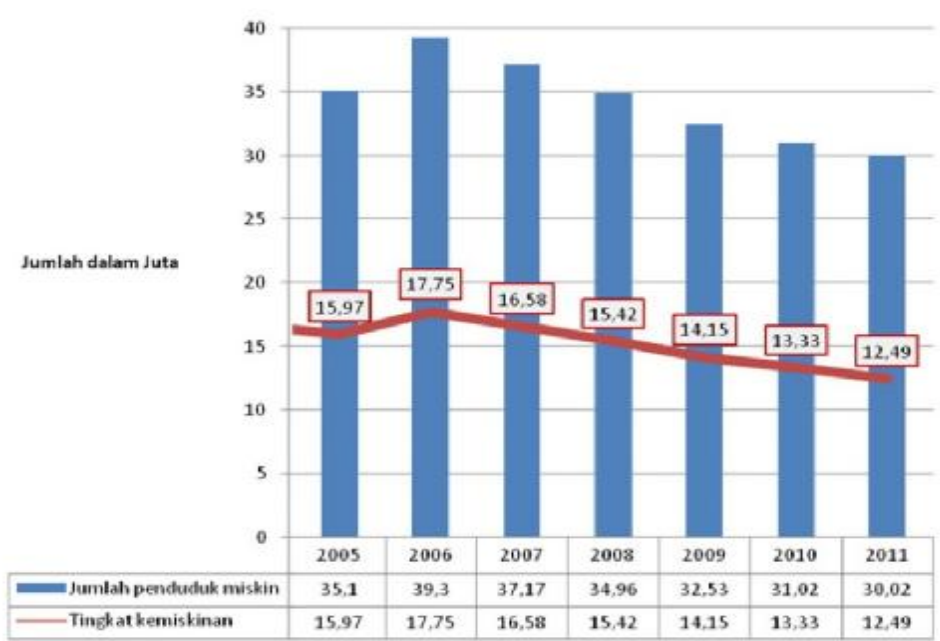
dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,5 juta orang (4,98 persen).

Di sisi lain jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), mengalami penurunan sebanyak 1 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Perkembangan dalam satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada tahun terakhir jauh lebih besar yaitu 73,52 persen pada bulan Maret 2011 dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan bukan makanan lainnya). Beberapa faktor sebagai penyebab menurunnya persentase penduduk miskin adalah:

1. Cukup rendahnya inflasi umum selama satu tahun terakhir yaitu sebesar 6,65 persen.
 2. Rata-rata upah buruh bangunan naik sebesar 7,14 persen.
 3. Produksi padi naik sekitar 2,4 persen mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling.
 4. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan melalui nilai tukar petani sebesar 103,32 atau naik 2,09 persen
 5. Tumbuhnya perekonomian Indonesia sebesar 6,5 persen tahun 2010.
- Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2005 sampai Maret 2011 sebagaimana tergambar dalam grafik I-2.

GRAFIK I-2.
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 2005-2011



Sumber : Sakernas BPS (2011)

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan secara nasional, Kemnakertrans sebagai salah satu instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, merencanakan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar, serta percepatan pembangunan daerah.

Secara lebih spesifik, upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk:

1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (*decent work*), dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
7. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Penyempurnaan kebijakan migrasi;
9. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya;
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya;
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada;
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi;
5. Membangun keterkaitan antara kota dan desa di kawasan transmigrasi;
6. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;
7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan

Namun demikian, seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ternyata masih banyak masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum terselesaikan dengan cukup baik.

C. Permasalahan dan Potensi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kemnakertrans. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain masih belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK), baik pusat maupun daerah secara maksimal, masih belum terpenuhinya kebutuhan instruktur di BLK, masih perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, belum sinkronnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih lemahnya lembaga hubungan industrial, terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri, rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear and clean*, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.

Di samping berbagai masalah yang dihadapi oleh Kemnakertrans dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan, tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang

berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait.

Dalam lingkup internal, terdapat beberapa regulasi (berikut perubahannya) yang menjadi kerangka dasar dari segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemnakertrans, terutama dalam konteks review Renstra ini. Pertama, pelaksanaan pembangunan bidang ketransmigrasian yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Kedua, pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, review Renstra dilakukan dengan mengacu pada Permenakertrans Nomor PER. 03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014. Keempat, Permenakertrans Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perubahan lain dalam sistem perencanaan dan penganggaran didukung dengan hadirnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, terutama UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada intinya, seluruh paket undang-undang itu menegaskan pokok-pokok reformasi mengenai perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), memiliki perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan sistem penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*). Sebagai tindak lanjut terhadap paket regulasi tersebut, maka disusun pula sejumlah langkah restrukturisasi yang bertujuan untuk menyempurnakan struktur program serta kegiatan di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun sasaran umum yang ingin dicapai dengan langkah restrukturisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga tersebut adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan yang berorientasi pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Formasi orientasi tersebut selanjutnya diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014.

2. Sumber Daya

Di samping faktor eksternal, terdapat pula beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kemnakertrans.

Keberadaan sumber daya Kemnakertrans, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kemnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Kemnakertrans sebanyak 4.981 orang. Dari angka total tersebut, mayoritas adalah pegawai golongan III sebesar 71,17 % (3.545) sedangkan golongan yang memiliki jumlah pegawai terkecil adalah golongan I sebesar 1,20 % (60). Bila ditinjau dari sudut jenis kelamin, mayoritas jumlah pegawai adalah laki-laki sebesar 63,40% (3.158) dan perempuan hanya sebesar 36,60% (1.823). Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas pegawai yang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1) sebesar 59,16 % (2.947). Dari kondisi struktur kepegawaian yang demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Kemenakertans memiliki potensi dan kapasitas SDM yang cukup memadai untuk menopang kinerjanya. Sehingga hal ini tentu perlu dikembangkan terus pada masa-masa mendatang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemnakertrans yang dirinci berdasarkan unit kerja Eselon I dan dirinci berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel I-1.

Tabel I-1.
Jumlah PNS
berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Golongan

No.	Unit Kerja Eselon I	Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat Jenderal	32	251	769	132	1.184
2.	Ditjen Binalattas	24	259	1.080	216	1.579
3.	Ditjen Binapenta	1	31	316	59	407
4.	Ditjen PHI dan Jamsos TK	0	21	158	36	215
5.	Ditjen Binwasnaker	0	13	173	33	219

6.	Ditjen P2 KT	1	26	362	59	448
7.	Ditjen P2 MKT	1	35	350	55	441
8.	Inspektorat Jenderal	0	20	113	53	186
9.	Balitfo	1	23	224	54	302
JUMLAH		60	679	3.545	697	4.981

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian 2011

3. Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan kepada pihak luar bahwa Kemnakertrans dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien melalui perencanaan program kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Unsur-unsur SPIP meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian.

Kemnakertrans telah melakukan pengendalian intern secara terintegrasi dan terus menerus terhadap unsur-unsur SPIP tersebut. Berbagai fungsi yang diemban di dalam struktur kelembagaan Kemnakertrans, mengimplementasikan unsur-unsur SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Hal itu juga mencakup pengamanan aset negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SPIP sebagai mekanisme kontrol lunak (*soft control*) merupakan sistem pengawasan internal (*internal control system*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap insan birokrasi pemerintah, khususnya di Kemnakertrans akan bekerja secara terkendali (*under control*) sehingga tercipta budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Ini berarti sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan Kemnakertrans. Inilah yang disebut kontrol lunak (*soft control*) dan merupakan spirit yang mendasari SPIP.

Upaya yang dilakukan untuk membudayakan SPIP antara lain: mempunyai SDM yang berkompeten dan berintegritas, meningkatkan budaya pengendalian intern melalui kesadaran (*awareness*) akan pentingnya berbagai risiko, meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Keberhasilan pelaksanaan SPIP tergantung dengan komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja serta respon positif terhadap pelaporan terkait keuangan, penganggaran, program dan kegiatan. Untuk aspek pengawasan secara struktural (*hard control*), berbagai kebijakan dan pedoman dipergunakan sebagai alat pengendali dalam manajemen pemerintahan, salah satunya adalah kegiatan pengendalian yang terdiri dari beberapa item, antara lain *review* terhadap kinerja Kemnakertrans, pengendalian terhadap pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik terhadap aset, penetapan dan *review* terhadap indikator dan ukuran kinerja serta penajaman terhadap fungsi-fungsi unit kerja.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemnakertrans mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kemnakertrans melaksanakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemnakertrans;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemnakertrans;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemnakertrans di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kemnakertrans terdiri dari 9 (Sembilan) unit kerja Eselon I dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;
10. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
11. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Otonomi Daerah;
12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
13. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional.

Selain unit kerja pusat yang mendukung kegiatan Kemnakertrans, juga terdapat 24 (dua puluh empat) unit kerja di daerah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).

B. Visi

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka visi Kemnakertrans 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

C. Misi

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
5. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi;
6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;
7. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas pengawasan intern, dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah:

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial;
4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*), profesional dan seragam di seluruh Indonesia;
5. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak;

6. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meningkatkan efektivitas pengawasan intern, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik.

E. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial;
4. Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja;
5. Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak;
6. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing;
7. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans;
8. Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan

1. Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mengacu pada arah kebijakan nasional, terutama 4 (empat) prioritas pembangunan nasional, yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) Iklim investasi dan usaha, (3)

Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, (4) Pembangunan di bidang pendidikan.

Prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian yang menjadi arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan;
- b. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri;

Kebijakan Kemnakertrans untuk mendukung 2 (dua) prioritas lainnya tersebut dilaksanakan melalui program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

2. Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Pembangunan ketenagakerjaan dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk:

- a. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
- b. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.
- d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum.
- e. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pedesaan yang terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi, serta fasilitasi penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi.
- f. Pembinaan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.
- g. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administrasi, pengawasan fungsional, sumber daya serta peningkatan fungsi penelitian pengembangan dan pengelolaan data dan informasi.

B. Strategi

1. Strategi Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan nasional tersebut, maka strategi umum yang akan dilaksanakan oleh Kemnakertrans adalah:

a. Penetapan Kebijakan dan Peraturan

Kemnakertrans akan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi

Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kementerian akan menjalin kerja sama dengan semua instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah, juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat (*stakeholders*). Koordinasi dengan memadukan/mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai *stakeholders* yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran menjadi prioritas utama.

c. Fasilitasi Program dan Pendampingan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kemnakertrans memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan. Kemnakertrans akan memberikan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Program-program pendampingan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong peran serta aktif masyarakat (*participatory process*).

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Kelembagaan Kemnakertrans akan disesuaikan dengan kebutuhan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, sehingga kapasitas kelembagaan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi.

e. Meningkatkan Kualitas Penerapan *Good Governance*

Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dilaksanakan sejalan dengan prinsip *good governance*. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang wajar tanpa pengecualian (WTP).

f. Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Selama ini berbagai kerja sama luar negeri telah dibangun dan dibina, baik secara bilateral maupun multilateral dan akan terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. Mengingat masih adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di luar negeri, maka kerja sama yang telah dirintis selama ini, antara lain dengan *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM) serta lembaga internasional lainnya akan terus ditingkatkan.

g. Pengarusutamaan Gender

Dalam dinamika hak asasi manusia (HAM), pengarusutamaan gender (PUG) adalah merupakan wawasan salah satu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian gender ke dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemnakertrans akan melanjutkan upaya penerapan pengarusutamaan gender secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

h. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan

Sebagai upaya untuk menjamin agar visi, misi, dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maka Kementerian melaksanakan pengendalian dan pengawasan, melalui SPIP.

i. *Monitoring* dan Evaluasi

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kemnakertrans, serta tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan strategi yang dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, maka diperlukan kegiatan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka langkah-langkah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan adalah:

- a. Fokus prioritas peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Penyusunan standar baku agar suatu lembaga pelatihan memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi;
 - 2) Pengembangan pedoman dan prosedur pengembangan sertifikasi kompetensi;
 - 3) Penyusunan panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan yang baik, termasuk *pilot project* pelaksanaannya;
 - 4) Penyempurnaan peraturan atau aturan main lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - 5) Pelaksanaan harmonisasi regulasi, standardisasi dan kompetensi tenaga kerja, serta kerangka kualifikasi nasional bidang pendidikan dan pelatihan;
 - 6) Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi termasuk pengembangan materi dan tempat uji kompetensi;
 - 7) Peningkatan jumlah dan kapasitas *asesor* kompetensi dan akreditasi.
- b. Fokus prioritas perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) Perbaikan sistem dan mekanisme hubungan industrial:
 - a) memperkuat perundingan bersama;
 - b) meningkatkan kemampuan teknik bernegosiasi; dan
 - c) mendorong penyelesaian secara bipartit.
 - 2) Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan:
 - a) sistem pengupahan dan penetapan upah minimum;
 - b) pengaturan dan kebijakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
 - c) kebijakan *outsourcing*;
 - d) kebijakan PHK dan uang pesangon;
 - e) pengidentifikasian kerangka hubungan industrial; dan
 - f) perbaikan prosedur penyelesaian perselisihan.
 - 3) Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan utama dan penegakan hukum:
 - a) menelaah kembali peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang belum mendorong ke arah kerja sama antara pengawas ketenagakerjaan dan tripartit;

- b) membuat aturan main (*rule of the game*) sistem pengawasan ketenagakerjaan di industri; dan
 - c) pemetaan industri menengah dan besar yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas sektor/sub sektor/jenis industri yang akan diperhatikan.
- 4) Peningkatan jaminan sosial pekerja:
- a) mengidentifikasi kebutuhan jaminan sosial berbagai kelompok pekerja;
 - b) menentukan risiko sosial pekerja;
 - c) menyusun program jaminan berdasarkan risiko, pendapatan dan kebutuhan;
 - d) identifikasi kesediaan dan kemampuan membayar iuran pada setiap pekerja serta membangun mekanisme pendukungnya; dan
 - e) mengumpulkan dan mengasuransikan kembali untuk meningkatkan keberlanjutan dan peranan sektor swasta.
- c. Fokus prioritas peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan kegiatan:
- 1) Peningkatan peran daerah dalam fasilitasi dan perlindungan pekerja:
- a) Pemerintah daerah harus menghilangkan berbagai pungutan dan retribusi atas perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi ke suatu daerah, khususnya dalam mencari pekerjaan; dan
 - b) Mengembangkan informasi pasar kerja akan bermanfaat bagi pekerja.
- 2) Menyempurnakan regulasi dan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran:
- a) menyempurnakan dan memperbaiki kebijakan asuransi pekerja migran dengan menciptakan transparansi prosedur pemilihan perusahaan;
 - b) memfasilitasi akses untuk memperoleh kredit perbankan melalui kerja sama antara perbankan dengan pengguna jasa pekerja;
 - c) menyempurnakan pengiriman remitansi tenaga kerja, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, memfasilitasi peningkatan kesepakatan kerja sama perbankan dengan perbankan negara penempatan;
 - d) menyempurnakan Peraturan Perlindungan Buruh, antara lain dengan meratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya, yang sudah ditandatangani perjanjiannya pada tahun 2004 dan menyempurnakan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dengan penekanan aspek perlindungan;

- e) meningkatkan peran perwakilan di luar negeri dalam perkembangan tugas “*networking* dan *market intelligent*”; dan
 - f) membagi secara jelas kewenangan masing-masing penyelenggara penempatan, baik antara kementerian/lembaga, antara pemerintah dan para penyelenggara penempatan, dan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan penempatan:
- a) melakukan perbaikan pelaksanaan penempatan, dengan melakukan *review*, pembenahan, meningkatkan koordinasi, mulai penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekrutmen, penerapan kriteria/persyaratan yang diperlukan, penyiapan pendidikan dan pelatihan serta menyempurnakan materi pembekalan akhir penempatan;
 - b) memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan termasuk menyempurnakan mekanisme sejak rekrutmen hingga keberangkatan;
 - c) meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/pelatihan;
- 4) Meningkatkan perlindungan pekerja migran:
- a) Pemberian dan akses bantuan hukum dengan menyelesaikan masalah hukum yang menimpa pekerja;
 - b) Penindakan tegas terhadap tindakan percaloan yang dilakukan oleh oknum dalam proses pemberangkatan pekerja ke luar negeri;
 - c) Pengurusutamaan prinsip HAM dalam penyusunan kebijakan dan pendidikan terhadap pekerja; dan
 - d) Pemberian akses dalam rangka peningkatan perlindungan, dengan membangun *hotline service* dalam bentuk kotak surat/kotak pos, mempercepat pembangunan rumah singgah (*shelter*) di KBRI untuk pekerja migran bermasalah, dan menyusun suatu prosedur untuk pemulihan kondisi pekerja migran yang memperoleh perlakuan kekerasan fisik, mental, termasuk pelayanan penyakit menular seksual.
- 5) Mengembangkan informasi pasar kerja luar negeri, mengembangkan sistem informasi secara terpadu yang dapat memberikan informasi pekerja migran secara efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal.

d. Pembangunan Perdesaan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi, serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu:

- 1) Program pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi kegiatan:
 - a) penyediaan tanah transmigrasi;
 - b) penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan penempatan transmigrasi;
 - c) pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi;
 - d) fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi; dan
 - e) pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.
- 2) Program pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a) pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
 - b) pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
 - c) peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 - d) penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi; dan
 - e) penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

e. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2010-2014 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir).

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
2. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
3. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
4. Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi; dan

5. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

C. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Kemnakertrans tahun 2011-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kemnakertrans, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung (Generik). Berikut ini gambaran mengenai 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung tersebut.

1. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan, maka dilaksanakan program dan kegiatan:

- a. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, dengan alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp4.053.619.000.000,-.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan;
- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga, Sarana dan Pelatihan Kerja;
- 3) Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
- 4) Peningkatan Kompetensi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan;
- 5) Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan;
- 6) Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;
- 7) Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah angka peserta pelatihan yang kompeten, yang diukur melalui:

- 1) Jumlah SKKNI yang ditetapkan;
- 2) Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan;
- 3) Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan;
- 4) Jumlah Instruktur dan PSM yang ditingkatkan kompetensinya;
- 5) Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih;
- 6) Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi;
- 7) Peningkatan pelayanan teknis administrasi, perencanaan program dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan serta hukum dan kerja sama luar negeri.

- b. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp3.267.500.000.000,- meliputi kegiatan:
- 1) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;
 - 2) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 3) Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri;
 - 4) Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal;
 - 5) Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - 6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya;
 - 7) Inkubasi Bisnis dan Pengembangan Model Perluasan Kesempatan Kerja.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang diukur melalui:

- 1) Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum;
- 2) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja;
- 3) Jumlah penempatan tenaga kerja khusus;
- 4) Jumlah fasilitasi penyediaan TKI;
- 5) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara;
- 6) Jumlah wirausaha baru yang tercipta;
- 7) Jumlah terapan teknologi tepat guna di daerah yang bersinergi untuk perluasan kesempatan kerja;
- 8) Jumlah pemberdayaan pendampingan perluasan kesempatan kerja;
- 9) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara;
- 10) Analisis dan perizinan penggunaan TKA;
- 11) Jumlah wirausaha baru dan pendamping masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi daerah.

- c. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Alokasi dana untuk program ini selama 5 (lima) tahun sebesar Rp1.307.690.000.000,-, mencakup kegiatan:

- 1) Pengelolaan Persyaratan Kerja, kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi;
- 2) Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;
- 3) Konsolidasi Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4) Pengelolaan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5) Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya;

Indikator kinerja utama dari program ini adalah meningkatnya syarat-syarat kerja dan menguatnya kelembagaan hubungan industrial, yang diukur dari:

- 1). Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan;
 - 2). Jumlah perjanjian kerja bersama yang didaftarkan;
 - 3). Jumlah pembentukan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
 - 4). Rasio penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama;
 - 5). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja yang menjadi peserta Jamsostek;
 - 6). Jumlah pembentukan lembaga kerjasama tripartit di kabupaten/kota;
 - 7). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja yang menjadi peserta Jamsostek;
 - 8). Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya;
 - 9). Tersusunnya peraturan bidang Hubungan Industrial yang meliputi pengaturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan Outsourcing), pengupahan (UM, KHI, upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja.
 - 10). Jumlah peraturan ketenagakerjaan bidang Hubungan Industrial dan Jamsos TK yang disempurnakan.
- d. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan alokasi dana selama 5 (lima) tahun sebesar Rp1.050.800.000.000,- meliputi:
- 1) Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak;
 - 2) Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3) Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4) Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan;
 - 5) Dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang diukur dari:

- 1) Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak;
- 2) Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK);
- 3) Jumlah Perusahaan yang menerapkan SMK3;
- 4) Kualitas Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan;
- 5) Kajian peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Ketransmigrasian

Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan pangan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan dukungan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp3.815.700.000.000,- meliputi :
 - 1) Fasilitasi penempatan transmigrasi;
 - 2) Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi;
 - 3) Penyediaan tanah transmigrasi;
 - 4) Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
 - 5) Partisipasi masyarakat;
 - 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi, yang diukur dari:

- 1) Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi;
- 2) Infrastruktur kawasan yang dibangun;
- 3) Lahan yang tersedia;
- 4) Rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
- 5) Lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- 6) Pelayanan teknis dan administratif.

b. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi dengan dukungan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp3.399.500.000.000,- meliputi :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
- 2) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
- 4) Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi;
- 5) Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;
- 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi (kimtrans) yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang, yang diukur dari:

- 1) Jumlah kimtrans dan kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarannya;
- 2) Jumlah luasan lahan yang produktif dan produktivitas lahan di Kimtrans dan Kawasan;
- 3) Jumlah kepala keluarga yang mendapat layanan sosial budaya dan kelembagaan di Kimtrans yang berfungsi;
- 4) Jumlah kimtrans yang mandiri dan kawasan yang berwawasan lingkungan;
- 5) Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat dan Kawasan yang dapat diimplementasikan;
- 6) Jumlah Pelayanan teknis dan administratif.

3. Bidang Pendukung

Kebijakan bidang pendukung diarahkan pada peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administratif, pengawasan fungsional, sumber daya, serta peningkatan fungsi penelitian, pengembangan dan pengelolaan data dan informasi. Dengan demikian, fungsi bidang pendukung ini adalah untuk menopang kinerja 6 (enam) unit kerja Eselon 1 yang terdapat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun upaya bidang pendukung tersebut diimplementasikan melalui melalui 3 (tiga) program, yaitu:

- a Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan dukungan anggaran selama lima tahun sebesar Rp1.423.400.000.000,- melalui kegiatan:

- 1) Peningkatan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan;
- 3) Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- 4) Pembentukan Pembaruan dan penyelesaian masalah hukum;
- 5) Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum;
- 6) Peningkatan dan Pengelolaan Kerja sama Luar Negeri;
- 7) Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
- 8) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- 9) Peningkatan Kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- 10) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah tertib dan lancarnya pelayanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans, yang diukur dari:

- 1) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Kemnakertrans;
 - 2) Jumlah dokumen anggaran;
 - 3) Jumlah dokumen rencana formasi dan kebutuhan pegawai;
 - 4) Jumlah kasus hukum yang diselesaikan;
 - 5) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Kemnakertrans;
 - 6) Jumlah pelayanan administrasi kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - 7) Jumlah pemberitaan yang positif bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - 8) Jumlah diklat;
 - 9) Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3;
 - 10) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional.
- b Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan dukungan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp228.710.000.000,- melalui kegiatan:
- 1) Pengawasan Inspektorat I;
 - 2) Pengawasan Inspektorat II;
 - 3) Pengawasan Inspektorat III;
 - 4) Pengawasan Inspektorat IV;
 - 5) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah pengawasan Inspektorat Jenderal, yang diukur dari jumlah objek pemeriksaan

- c Program Penelitian dan Pengembangan Kemnakertrans, dengan dukungan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp286.690.000.000,- melalui kegiatan:
- 1) Penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - 2) Penelitian dan pengembangan ketransmigrasian;
 - 3) Pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - 4) Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian;
 - 5) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dijadikan bahan kebijakan, yang diukur dari:

- 1) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan jamsos, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan;
- 2) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan kawasan transmigrasi, serta bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/kebijakan;
- 3) Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan: pangkalan data dan informasi ketenagakerjaan umum, bidang pelatihan dan produktivitas serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- 4) Jumlah data dan informasi bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 5) Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya (perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan).

Dari pemaparan berbagai program dan kegiatan tersebut, dapat terlihat bahwa struktur program yang terdiri dari 6 (enam) program unit teknis dan 3 (tiga) program pendukung dalam lingkungan Kemnakertrans pada dasarnya sudah cukup akomodatif terhadap berbagai arah dan kebijakan pembangunan nasional, fokus prioritas nasional dan bidang, perubahan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada era globalisasi dan otonomi daerah. Namun demikian, tetap disadari bahwa berbagai perbaikan masih diperlukan.

Upaya-upaya perbaikan itu tentunya sudah dan sedang dilakukan oleh Kemnakertrans untuk semakin memantapkan pembangunan di bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Salah satu langkah perbaikan tersebut adalah dengan dilakukannya perencanaan dan penganggaran yang responsif *gender* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 dan MOU antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 06/Men.PP & PA/5/2010 tentang peningkatan efektifitas dalam pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*).

Perencanaan dan penganggaran responsif gender ini tidak hanya akan menciptakan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, namun juga menekankan basis kinerja perencanaan dan penganggarnya karena level *output* digunakan sebagai dasar dalam menyusun *gender analysis pathway* dan *gender budget statement*. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

BAB IV PENUTUP

Review Renstra Kemnakertrans tahun 2010-2014 ini memuat berbagai pertimbangan, penilaian dan penyempurnaan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan Kemnakertrans. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Renstra Kemnakertrans Tahun 2010-2014.

Review Renstra ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan oleh Presiden serta tugas dan fungsi Kemnakertrans.

Review Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran organisasi di lingkungan Kemnakertrans. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai *review Renstra* dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kemnakertrans. Dengan demikian, *review Renstra Kemnakertrans* ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja K/L 3 (tiga) tahun mendatang.

Sebanyak 9 (sembilan) program kementerian untuk menunjang 4 (empat) prioritas nasional serta 2 (dua) prioritas bidang dirancang sejalan dengan kebijakan di RPJM 2010-2014 dengan pendanaan sebesar Rp. 18,833 triliun selama periode 2010-2014. Melalui *review Renstra* ini dapat terlihat bahwa 9 (sembilan) program tersebut memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasikan berbagai perubahan yang terjadi dan cukup mempengaruhi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Namun demikian, demi mempercepat pencapaian tujuan tersebut diperlukan beberapa perbaikan dan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu, maka *review Renstra* ini disusun. Dengan adanya *review Renstra* ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR,

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
 Program : Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 Hasil (Outcome) : Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
 IKU Program : Angka Peserta Pelatihan yang Kompeten

No	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
				2010	2011	2012	2013	2014			
1	Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan (Prioritas Bidang)	Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan tenaga kerja, calon/transmigran yang kompeten dan produktif	Jumlah SKKNI yang ditetapkan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang disusun Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Peningkatan kualitas dan penyelenggaraan kompetisi keterampilan dalam rangka ASC	35 91 33.000 21 Kej	50 166 86.000 22 Kej	50 204 95.000 22 Kej	50 234 105.000 22 Kej	50 263 115.000 22 Kej	1. Dit. Stankomprogat 2. UPTP 3. Denakertrans 4. UPTD-BL/K/LK/LK 5. UPTD Balaistransda	1.239.644.776	
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan pemberdayaan lembaga pelatihan dan produktivitas (Prioritas Bidang)	Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen LPK yang disusun Jumlah lembaga pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah lembaga pelatihan yang ditingkatkan kualitasnya	- - -	8 135 144	7 62 217	7 71 261	7 80 287	1. Dit. Bina Lemsar 2. UPTP 3. UPTD-BL/K/BPPD/Balaistran sda	910.136.305	
3	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya program pemagangan dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan Jumlah penyelenggara program pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	10.000 10.000 1.000	10.000 10.000 275	10.000 10.000 325	10.000 10.000 300	10.000 10.000 300	1. Dit. Bina Pemagangan 2. UPTP 3. Denakertrans	404.416.836	
4	Peningkatan kompetensi instruktur, PSM dan Tenaga Keahlian (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kompetensi instruktur, PSM dan Tenaga Keahlian	Jumlah Instruktur dan PSM yang ditingkatkan kompetensinya	750 750 300	1000 600 500	1250 1500 1000	1500 1250 1250	1500 1500 1250	1. Dit. Inlata 2. UPTP 3. Denakertrans	327.124.454	
5	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas (Prioritas Bidang) dan Kewirausahaan (Prioritas Nasional)	Tertaksananya pelatihan calon wirausaha baru meningkatkan produktivitas dan tenaga kerja perusahaan	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya Jumlah Provinsi, kabupaten/ kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas Jumlah Perusahaan yang ditingkatkan produktivitasnya Jumlah desa produktif yang dikembangkan	5.000 1.500 110/ kab/ kota 85 85 125 165	10.000 15.000 110/ kab/ kota 85 85 125 165	10.000 17.000 110/ kab/ kota 85 85 125 165	10.000 19.000 110/ kab/ kota 85 85 125 165	10.000 21.000 110/ kab/ kota 85 85 125 165	1. Dit. Produktivitas 2. BPPD CE/EST 3. UPTD BPPD 4. Denakertrans 5. UPTP	611.188.631	

No	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
6	Pengembangan sistem dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi (Prioritas K/L)	Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja	Jumlah LSP (first/second/Third party) yang di lisensi	70 LSP	100 LSP	125 LSP	150 LSP	250 LSP	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	173.978.486
			Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	2.000	10.000	10.000	15.000	11.750		
			Jumlah asesor uji kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya	500	1000	1.500	1.000	1.000		
			Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri	100	75	75	75	75		
			Peningkatan Pelayanan administrasi, teknis, perencanaan program, keuangan dan	6 Komisi	6 Komisi	6 Komisi	6 Komisi	6 Komisi		
7	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Dijen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Prioritas K/L)	Meningkatnya Pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilindungi Dijen Binaletas	Peningkatan pelayanan teknis administrasi, perencanaan program dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan serta hukum dan kerjasama luar negeri	25 Satker	25 Satker	25 Satker	25 Satker	25 Satker	Set Dijen Binaletas	387.129.512
			Jumlah Penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan Binaletas	6	6	6	6	6		
			Peningkatan dan pembinaan kualitas SDM Dijen Binaletas	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org		
			Jumlah mitra kerjasama luar negeri bidang Letas	5 Negara /Lembaga	7 Negara /Lembaga	9 Negara /Lembaga	11 Negara /Lembaga	12 Negara /Lembaga		
BASELINE				619.019.000	762.000.000	817.700.000	874.000.000	980.900.000		4.053.619.000

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 Program : Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 Hasil (outcome) : Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
 IKU Program : Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			Keluaran	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja (Prioritas Bidang)	Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja	Informasi pasar kerja		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Dit. Pengembangan Pasar Kerja	267.583.070
			Analisis pasar kerja		33 provinsi, 5 negara, KEK	33 provinsi, 5 negara, KEK	33 provinsi, 5 negara, KEK	33 provinsi, 5 negara, KEK		
			Bursa kerja		33 provinsi, 300 kab/kota	33 provinsi, 375 kab/kota	33 provinsi, 456 kab/kota	33 provinsi, 456 kab/kota		
			Analisis jabatan		600 jabatan	650 jabatan	725 jabatan			
			Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD)/antar kerja lokal (AKL, dan kelembagaan tenaga kerja		75.000 orang, 33 prov	80.000 orang, 33 prov	100.000 orang, 33 prov	100.000 orang, 33 prov		
2	Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (Prioritas K/L)	Terfasilitasinya pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	Penempatan tenaga kerja khusus muda dan wanita, serta penyandang cacat dan lanjut usia		1.000 orang	1.200 orang	1.500 orang	1.500 orang	Dit. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	223.030.456
			Penyuluhan jabatan dan bimbingan jabatan (PBJ)		720 orang	820 orang	1.200 orang	1.200 orang		
			Pengembangan kompetensi pengantar kerja, dan kerjasama antar lembaga		100 orang, 33 provinsi	200 orang, 33 provinsi	200 orang, 33 provinsi	200 orang, 33 provinsi		
			Pertanian, kehutanan dan evaluasi kinerja kelembagaan		50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi		
			Penyipan data dan dokumen penempatan, dan fasilitasi penyediaan tenaga kerja Indonesia (TKI)		22 provinsi, 100% calon pekerja migran terlayani	22 provinsi, 100% calon pekerja migran terlayani	22 provinsi, 100% calon pekerja migran terlayani	22 provinsi, 100% calon pekerja migran terlayani		
3	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri (Prioritas Nasional)	Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran dan kesejahteraan keluarga	Advokasi dan kepelangan, serta sarana dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI)		14 embarkasi	14 embarkasi	14 embarkasi	14 embarkasi	Dit. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	526.369.947

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			Keluaran	2010	2011	2012	2013		
		Kerjasama bilateral, serta regional dan multilateral meliputi inisiasi, negosiasi dan perjanjian kerjasama			penyajian ratifikasi konvensi buruh migran; amandemen UU 38/2004; 100% peraturan turunan tersusun; 13 MoU	penyajian ratifikasi konvensi buruh migran; amandemen UU 39/2004; 100% peraturan turunan tersusun; 15 MoU	penyajian ratifikasi konvensi buruh migran; amandemen UU 39/2004; 100% peraturan turunan tersusun; 17 MoU		
		Atase ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran			13 atase	13 atase	13 atase		
4	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Prioritas Nasional)	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang usaha produktif	Tenaga kerja mandiri dan sektor informal		10.000 orang wirausaha baru yang tercipta; 125 orang pembinaan wirausaha baru	10.000 orang wirausaha baru yang tercipta; 125 orang pembinaan wirausaha baru	10.000 orang wirausaha baru yang tercipta; 125 orang pembinaan wirausaha baru	10.000 orang wirausaha baru yang tercipta; 125 orang pembinaan wirausaha baru	
		Pengembangan padat karya			105.072 orang masyarakat penganggur /setengah penganggur; 8.340 WUB; 360 kab/kota	90.000 orang masyarakat penganggur /setengah penganggur; 8.340 WUB; 360 kab/kota	90.000 orang masyarakat penganggur /setengah penganggur; 8.340 WUB; 360 kab/kota	90.000 orang masyarakat penganggur /setengah penganggur; 8.340 WUB; 360 kab/kota	Dit. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan TK Sektor Informal
		Terapan teknologi tepat guna			5.800 orang WUB; 290 kab/kota	5.800 orang WUB; 290 kab/kota	5.800 orang WUB; 290 kab/kota	5.800 orang WUB; 290 kab/kota	
		Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerjasama antar lembaga			2.000 orang pendamping wirausaha; 1.300 orang TKS; 33 provinsi	2.000 orang pendamping wirausaha; 1.500 orang TKS; 33 provinsi	2.000 orang pendamping wirausaha; 1.600 orang TKS; 33 provinsi	2.000 orang pendamping wirausaha; 1.600 orang TKS; 33 provinsi	

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			Keluaran	2010	2011	2012	2013	2014		
5	Peningkatan Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (Prioritas K/L)	Meningkatnya pelayanan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing	Analisis dan perizinan		74.000 izin; 21 kerjasama kelengkapan; 60.000 orang tenaga kerja pendamping yang telah memperoleh alih pengetahuan; 25.000 orang hasil verifikasi; 25.000 orang hasil perpanjangan RPTKA dan IMTA di Prov/Kab/Kota; 8 lokasi pelayanan perizinan secara on-line di daerah	79.000 izin; 24 kerjasama kelengkapan; 60.000 orang tenaga kerja pendamping yang telah memperoleh alih pengetahuan; 25.000 orang hasil verifikasi; 25.000 orang hasil perpanjangan RPTKA dan IMTA di Prov/Kab/Kota; 9 lokasi pelayanan perizinan secara on-line di daerah	80.000 izin; 30 kerjasama kelengkapan; 60.000 orang tenaga kerja pendamping yang telah memperoleh alih pengetahuan; 25.000 orang hasil verifikasi; 25.000 orang hasil perpanjangan RPTKA dan IMTA di Prov/Kab/Kota; 8 lokasi pelayanan perizinan secara on-line di daerah	80.000 izin; 30 kerjasama kelengkapan; 60.000 orang tenaga kerja pendamping yang telah memperoleh alih pengetahuan; 25.000 orang hasil verifikasi; 25.000 orang hasil perpanjangan RPTKA dan IMTA di Prov/Kab/Kota; 8 lokasi pelayanan perizinan secara on-line di daerah	Dit. Pengendalian Penggunaan TKA	52.252.342
			Penyelarasan peraturan penempatan tenaga kerja asing untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan		
			Pengendalian dan kerjasama kelembagaan		12 sub sektor draft daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, 25 provinsi	13 sub sektor draft daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, 30 provinsi	14 sub sektor draft daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, 33 provinsi	14 sub sektor draft daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, 33 provinsi		
6	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya (Prioritas K/L)	Meningkatnya pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilindungi lingkungan dijen bina perantara	Peningkatan pelayanan teknis administrasi; perencanaan program dan anggaran, keuangan, ketatausahaan dan kerumahaan; peningkatan koordinasi internal dan eksternal		1 paket, 7 satker	1 paket, 7 satker	1 paket, 7 satker	1 paket, 7 satker	Setdjen, Bina perantara	349.596.040
			Peningkatan pelayanan program, evaluasi dan pelaporan; keuangan; hukum dan kerjasama luar negeri; kepegawaian dan umum		4 paket, 7 satker	4 paket, 7 satker	4 paket, 7 satker	4 paket, 7 satker		

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			Keluaran	2010	2011	2012	2013	2014		
7	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan kesempatan Kerja (Prioritas KI)	Meningkatnya jumlah masyarakat yg menerima manfaat program, jumlah rekomendasi dan penguatannya jejaring kerjasama dalam rangka penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Wirusaha baru yang mampu memanfaatkan potensi daerah.		400 org	592 org	720 org	720 org	Balai Besar Pengembangan Perluasan Kerja Lembang	123.850.272
			Kader/pemandu yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menjadi wirusahawan	-	160 org	200 org	240 org	240 org		
			Rekomendasi model dan hasil kerjasama kelembagaan dalam rangka pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	-	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi		
			Instansi lembaga yang menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan dan perluasan kerja	-	25 lembaga	25 lembaga	30 lembaga	30 lembaga		
		BASE LINE		445.000.000	626.700.000	644.700.000	759.700.000	791.400.000		3.267.500.000

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
 TENAGA KERJA
 Program : Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Hasil (outcome) : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial
 IKU Program : Meningkatkan syarat-syarat kerja dan menguatnya kelembagaan HI

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi (Prioritas K/L)	Tercapainya penerapan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yg ditandatangani Jumlah Koperasi pekerja/buruh yang mendapatkan modal usaha Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan di tempat kerja	2500 PP 200 100 kop	2500 PP 200 150 kop	2000 PP 250	2000 PP 250	2000 PP 250	Dit. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	129.938.000
2	Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan HI (Prioritas Bidang)	Tercapainya tata kelola kelembagaan dan pemasyarakatan HI	Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan Jumlah pembentukan lembaga kerja sama (LKS) Tripartit di Kab/kota Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan tentang hubungan industrial	400 lembaga 49 lembaga 200 org 1250	400 lembaga 50 lembaga 500 org 1750	400 lembaga 50 lembaga 750 org 2250	400 lembaga 50 lembaga 1000 org 2750	Dit. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	299.832.000	
3	Konsolidasi peningkatan intensitas pencegahan dan Penyelamatan Perselisihan HI (Prioritas K/L)	Menurunnya tingkat perselisihan hubungan industrial	Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama	85%	85%	85%	85%	85%	Dit. Pencegahan dan Penyelamatan Perselisihan Hubungan Industrial	163.039.000
4	Pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja (Prioritas K/L)	Diterapkannya pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik	Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (DHK) yang menjadi peserta Jamsostek Jumlah TK Luar Hubungan Kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan penundungan dan/atau penerapan struktur dan skala upah	350.000 org 10.000 org	400.000 org 13.500 org	400.000 org 10.000 org	400.000 org 10.000 org	400.000 org 10.000 org	Dit. Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	140.366.000

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)																										
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014																												
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. (Prioritas K/L)	Meningkatnya pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen PHI dan Jansos TK	Dukungan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	Sekretariat Ditjen PHI & JSTK	584.516.000																										
		Dukungan pelaksanaan anggaran; urusan perbendaharaan dan tela usaha keuangan	Dukungan pelaksanaan teknis kerjasama luar negeri	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin																												
											Dukungan urusan administrasi kepegawaian dan tata laksana urusan tela usaha rumah tangga dan pertengkepan	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin																					
																Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Bidang HI dan Jansos TK	1 Bahan masukan/kajian penyempurnaan	1 Naskah akademis	Rancangan Draft	Sosialisasi																
																					a. Tersusunnya peraturan bidang HI yg meliputi pengaturan tentang kompensasi & penetapan PHK, Hubungan kerja (PKWT & Outsourcing), pengupahan (UM, KHL, upah selama skoring), perlindungan pekerja, mogok kerja															
																										b. Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/buruh										
																															c. Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI		1 Bahan masukan/kajian penyempurnaan	1 Naskah akademis	Rancangan Draft	Sosialisasi
BASE LINE				121.350.000	240.680.000	231.240.000	331.870.000	382.550.000		1.307.690.000																										

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Program : Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Hasil (outcome) : Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
IKU Program : Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK 3)

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak (Prioritas Nasional)	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Tumbuhnya Pekerja Anak	Jumlah pekerja anak yang dilirik dari BPTA	4.300 anak	4.300 anak	5.600 anak	6.900 anak	8.400 anak	Dit. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	300.962.155
			Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak			1 aturan pelaksanaan				
			Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak		25%	30%	40%	40%		
			Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak		naik 15 %	naik 15 %	naik 15 %	naik 15 %		
			Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak		naik 15 %	naik 15 %	naik 15 %	naik 15 %		
2	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Prioritas K/L)	Meningkatnya Aturan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat Serta Pekerja yang Menerima Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 12 %	Dit. Pengawasan Norma Kerja dan JSTK	69.460.135
			Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 12 %		
			Perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 12 %		
			Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK)		% penerima JK dan JKK turun 10%	% penerima JK dan JKK turun 10%	% penerima JK dan JKK turun 10%	% penerima JK dan JKK turun 12%		

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)	
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014			
3	Peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Prioritas Nasional)	Meningkatnya Penerapan Manajemen dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan SMK3		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	Dit. Pengawasan Norma K3	366.955.205
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik, konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %			
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %			
4	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan Dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan (Prioritas K/L)	Meningkatnya Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Kualitas teknis Pemeriksaan norma ketenagakerjaan		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	Dit. Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	69.560.136	
			Kualitas Teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %			
			Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %			
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya (Prioritas K/L)	Meningkatnya pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan	Kualitas Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan		naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	naik 10 %	Sesditjen Binwasnaker	243.862.369	
			Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya (Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Ketataaksanaan & Kerumah tanggaan)		12 Bin	12 Bin	12 Bin	12 Bin			
			Kajian peraturan perundang-undangan Pengawasan Ketenagakerjaan dan koordinasi kerjasama luar negeri		12 Bin	12 Bin	12 Bin	12 Bin			
BASE LINE			Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan		60 orang	60 orang	60 orang	60 orang			
				120.100.000	154.700.000	232.300.000	233.800.000	309.900.000		1.050.800.000	

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 Program : Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 Hasil (outcome) : Terwujudnya Permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
 IKU Program : Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigrasi yang ditempatkan di kawasan transmigrasi

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELURAHAN	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Facilitasi penempatan transmigrasi (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang)	Tertfasiliasinya penempatan transmigrasi	Keluarga yang difasilitasi perindahannya ke permukiman transmigrasi	6.038 KK di wil. Tertinggal/ perbatasan, dan 1.740 KK di wil. Strategis (8.598 KK)	6.290 KK di wil. Tertinggal/ perbatasan, dan 2.210 KK di wil. Strategis (8.500 KK)	5.365 KK di wil. Tertinggal/ perbatasan, dan 3.045 KK di wil. Strategis (9.000 KK)	5.504 KK di wil. Tertinggal/ perbatasan, dan 3.745 KK di wil. Strategis (9.250 KK)	5.580 KK di wil. Tertinggal/ perbatasan, dan 3.720 KK di wil. Strategis (9.300 KK)	389.864,703
2	Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang)	Terbangunnya permukiman transmigrasi dan infrastruktur di kawasan transmigrasi	Sarana yang dibangun	8.906 unit di wil. Tertinggal/ perbatasan dan 2.159 unit di wil. Strategis (11.065 unit)	9.590 unit di wil. Tertinggal/ perbatasan dan 3.661 unit di wil. Strategis (13.221 unit)	12.113 unit di wil. Tertinggal/ perbatasan dan 2.871 unit di wil. Strategis (14.984 unit)	12.233 unit di wil. Tertinggal/ perbatasan dan 3.017 unit di wil. Strategis (15.250 unit)	15.657 unit di wil. Tertinggal/ perbatasan dan 3.240 unit di wil. Strategis (18.897 unit)	2.804.559,460
3	Penyediaan lahan transmigrasi (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang)	Tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Pasana yang dibangun	37.68 KM di wilayah tertinggal/perbatasan dan 113.32 KM di wilayah strategis (151 KM)	236 KM di wilayah tertinggal/perbatasan dan 80 KM di wilayah strategis (316 KM)	294,5 KM di wilayah tertinggal/perbatasan dan 131,7 KM di wilayah strategis (426,20 KM)	220,42 KM di wilayah tertinggal/perbatasan dan 156,73 KM di wilayah strategis (417,15 KM)	247,73 KM di wilayah tertinggal/perbatasan dan 1216,50 KM di wilayah strategis (464,23 KM)	186.069,626
4	Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi (Prioritas Bidang)	Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi	Rencana pembangunan kawasan transmigrasi	5 kawasan tertinggal/ perbatasan dan 1 kawasan strategis (6 kawasan)	5 kawasan tertinggal/perbatasan dan 1 kawasan strategis (6 kawasan)	5 kawasan tertinggal/perbatasan dan 1 kawasan strategis (6 kawasan)	6 kawasan tertinggal/perbatasan dan 2 kawasan strategis (10 kawasan)	7 kawasan tertinggal/perbatasan dan 2 kawasan strategis (9 kawasan)	100.712,511
5	Partisipasi masyarakat (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang)	Memingginya peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan transmigrasi dalam rangka pembangunan peresahan	Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi	270 lembaga di kawasan tertinggal/ perbatasan dan 34 lembaga di kawasan strategis (304 lembaga)	104 lembaga di kawasan tertinggal/ perbatasan dan 11 lembaga di kawasan strategis (115 lembaga)	104 lembaga di kawasan tertinggal/ perbatasan dan 11 lembaga di kawasan strategis (115 lembaga)	104 lembaga di kawasan tertinggal/ perbatasan dan 11 lembaga di kawasan strategis (115 lembaga)	104 lembaga di kawasan tertinggal/ perbatasan dan 11 lembaga di kawasan strategis (115 lembaga)	119.441,018
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi dan pendanaan transmigrasi	Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi dan pendanaan transmigrasi	Pelayanan teknis dan administratif	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	416.252,482
BASE LINE				646.300.000	683.300.000	751.000.000	826.200.000	908.800.000	3.816.700.000

LAMPIRAN 1
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KAWASAN TRANSMIGRASI
 Program : Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 Hasil (outcome) : Berembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saling.
 IKU Program : Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi yang Berkebang

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan (Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	Berkebangnya sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi	Jumlah Kinttrans/Kawasan yang dikembangkan sarannya	30 kinttrans/ 20 kawasan	31 kinttrans/ 20 kawasan	34 kinttrans/ 20 kawasan	40 kinttrans/ 22 kawasan	40 kinttrans/ 22 kawasan	Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	1.016.791.699
2	Pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi (Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	Meningkatnya produktivitas lahan dan penerapan teknologi tepat guna, berkebangnya jejaring pemasaran, kelembagaan ekonomi yang fungsional dan tumbuhnya wirausaha mandiri	Jumlah luasan lahan produktif dan produktifas lahan di permukiman transmigrasi Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di kawasan transmigrasi Jumlah kewirausahaan yang berkebang di kawasan transmigrasi Jumlah kawasan yang dipersiapkan/dikembangkan/erwujud sebagai Agrolndustri	6.734 Ha/ 20.202 Ton 128 kinttrans 46 lembaga 2000 orang 0 kawasan	7.116 Ha/ 12.962 Ton 162 kinttrans 65 lembaga 2000 orang 0 kawasan	10.242 Ha/ 30.726 Ton 96 kinttrans 87 lembaga 2000 orang 0 kawasan	10.131 Ha/ 30.393 Ton 106 kinttrans 100 lembaga 2000 orang 0 kawasan	10.614 Ha/ 31.642 Ton 119 kinttrans 139 lembaga 2000 orang 2 kawasan	Direktorat Pengembangan Usaha	782.941.659
3	Peningkatan kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	Meningkatnya kapasitas masyarakat transmigrasi yang produktif, sehat, terdidik dan kelembagaan yang berfungsi di kinttrans/kawasan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di kinttrans Jumlah Permukiman Transmigrasi/ kawasan yang mendapat layanan sosial budaya/pendidikan, mental spiritual Jumlah kelembagaan/pegelela yang terbentuk dan berfungsi di permukiman transmigrasi/kawasan Jumlah KK yang mendapat bantuan pendampingan/pendayaan di kinttrans	50.731 KK 155 kinttrans/ 18 kawasan 76 lembaga/ 18 kawasan	53.171 KK 155 kinttrans/ 18 kawasan 91 lembaga/ 18 kawasan	41.622 KK 197 kinttrans/ 18 kawasan 22 lembaga/ 18 kawasan	49.118 KK 255 kinttrans/ 18 kawasan 13 lembaga/ 18 kawasan	56.719 KK 300 kinttrans/ 18 kawasan 51 lembaga/ 18 kawasan	Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat	666.431.219
4	Penyeragaman lingkungan di Kawasan Transmigrasi (Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	Berkebangnya permukiman transmigrasi yang mandiri dan pusat pertumbuhan kawasan yang berkelanjutan	Jumlah dokumen lingkungan hidup di permukiman transmigrasi/kawasan Jumlah mtigasi lingkungan di permukiman transmigrasi/kawasan Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri Jumlah hasil evaluasi perkembangan pusat pertumbuhan	15 dokumen/ 2 kawasan 11 kinttrans/ 3 kawasan 62 kinttrans	19 dokumen/ 2 kawasan 15 kinttrans/ 2 kawasan 76 kinttrans	29 dokumen/ 5 kawasan 11 kinttrans/ 8 kawasan 18 kinttrans	14 dokumen/ 5 kawasan 29 kinttrans/ 4 kawasan 17 kinttrans	16 dokumen/ 1 kawasan 28 kinttrans/ 7 kawasan 17 kinttrans	Direktorat Penyeragaman Lingkungan	180.652.734

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
5	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Prioritas Bidang)	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkualitas	Jumlah dokumen tentang masyarakat di kintans dan rentang kawasan transmigrasi yang dapat diaplikasikan	15 kintans/ 2 kawasan	22 kintans/ 2 kawasan	28 kintans/ 4 kawasan	33 kintans / 8 kawasan	35 kintans / 8 kawasan	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	312.234.675
			Jumlah dokumen rencana pengembangan pusat pertumbuhan yang dapat diaplikasikan	0 pusat pertumbuhan	2 pusat pertumbuhan	4 pusat pertumbuhan	8 pusat pertumbuhan	8 pusat pertumbuhan		
			Data dan informasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang akurat dan valid	155 kintans/ 10 kawasan	195 kintans/ 10 kawasan	182 kintans/ 10 kawasan	166 kintans/ 14 kawasan	166 kintans/ 6 kawasan		
			Jumlah Master plan di WPT yang di-Perdakan	2 kawasan	2 kawasan	4 kawasan	3 kawasan	3 kawasan		
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT (Prioritas KL)	Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif Ditjen P2MKT	Pelayanan teknis dan administratif	12 bhn	12 bhn	12 bhn	12 bhn	12 bhn	Sekretariat Direktorat Jendral P2MKT	441.448.014
			BASE LINE	584.200.000	606.600.000	687.300.000	734.000.000	807.400.000		

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : SEKRETARIAT JENDERAL
 Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 Hasil (outcome) : Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 Kemakertans
 IKU Program : Tertib dan lancarnya pelayanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemakertans

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran	Meningkatnya pelayanan perencanaan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi pelaporan di bidang ketransmigrasian	Dokumen perencanaan umum bidang ketransmigrasian dan ketransmigrasian	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	Biro Perencanaan	71.277.227
			Dokumen program dan anggaran di lingkungan Kemakertans	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok		
			Bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kemakertans	30 bahan	30 bahan	13 bahan	13 bahan	15 bahan		
			Pengelola keuangan dan pembinaan perbendaharaan dan TUK	79 laporan	79 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan		
			Dokumen pelaksanaan anggaran	2925 org	2500 org	2750 org	3000 org	3250 org		
2	Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen pelaksanaan anggaran	450 DIPA	450 DIPA	73 DIPA	86 DIPA	86 DIPA	Biro Keuangan	422.174.452
			Pengajuan SPP dan penentian SPM	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov		
			Laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		
			Pedoman kelembagaan	3 Pedoman	4 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman		
			Dokumen akurabilitas unit kerja	30 Dokumen	50 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen		
3	Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawain	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, pelayanan ketatalaksanaan dan kepegawain	Dokumen usulan kebutuhan dan formasi pegawai jabatan di lingkungan kementerian yang diisi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Organisasi dan Kepagawain	65.210.431
			Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	543 jabatan	543 jabatan	543 jabatan	543 jabatan	543 jabatan		
			Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	2 RUU, 6 RPP, 1 RPERPRES, 30 RPERMEN/ KEMEN	2 RUU, 6 RPP, 1 RPERPRES, 32 RPERMEN/ KEMEN	3 RUU, 6 RPP, 1 RPERPRES, 34 RPERMEN/ KEMEN	2 RUU, 6 RPP, 2 RPERPRES, 36 RPERMEN/ KEMEN	2 RUU, 6 RPP, 1 RPERPRES, 1 RPERPRES, 38 RPERMEN/ KEMEN		
			Peraturan perundang-undangan yang ditelaah	1 UU, 3 konvensi, 7 PKT (PP/KEPPRES/PERMEN/PERDA)	2 UU, 3 konvensi, 5 PKT (PP/KEPPRES/PERMEN/PERDA)	1 UU, 3 konvensi, 8 PKT (PP/KEPPRES/PERMEN/PERDA)	1 UU, 3 konvensi, 6 PKT (PP/KEPPRES/PERMEN/PERDA)	1 UU, 3 konvensi, 5 PKT (PP/KEPPRES/PERMEN/PERDA)		
			Peserta Sosialisasi PPU	350 org	350 org	400 org	450 org	450 org		
4	Pembentukan Pembinaan dan penyelesaian masalah hukum	Meningkatnya pelayanan pembinaan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	Kasus hukum yang diselesaikan	20 kasus	20 kasus	40 kasus	30 kasus	25 kasus	Biro Hukum	45.459.978

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
5	Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum	Meningkatnya pelayanan urusan administrasi, perlengkapan dan inventarisasi barang milik/keayaan negara/ ketatausahaan pimpinan dan kementerian.	Bangunan, sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi/diadakan Persyaratan dan keaspisan kementerian Pegawai dan pelayanan pimpinan Laporan BWN	61 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	138 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	138 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	150 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	155 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Biro Umum	342.808.347
6	Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Informasi kepada Masyarakat, Analisis pendapat umum dan kerjasama antar lembaga	Pembinaan yang positif bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Layanan Informasi di Media Cetak dan Elektronik Koordinasi, Konsultasi dan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Publikasi, Dokumentasi dan Layanan Perpustakaan dan informasi kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	210 Berita 50 Informasi 8 lembaga 12 Bulan	213 Berita 56 Informasi 8 lembaga 12 Bulan	220 Berita 60 Informasi 9 lembaga 12 Bulan	230 Berita 66 Informasi 11 lembaga 12 Bulan	240 Berita 70 Informasi 12 lembaga 12 Bulan	Pusat Humas	165.571.660
7	Peningkatan dan Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	Meningkatnya pelayanan administrasi kerjasama bilateral dan multilateral bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Laporan pelayanan administrasi kerjasama bilateral dan multilateral di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Laporan fasilitas kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	38 laporan 30 laporan/10 kerjasama 40 laporan 31 laporan/ 10 kerjasama 42 laporan 44 laporan 46 laporan	38 laporan 30 laporan/10 kerjasama 40 laporan 31 laporan/ 10 kerjasama 42 laporan 44 laporan 46 laporan	38 laporan 30 laporan/10 kerjasama 40 laporan 31 laporan/ 10 kerjasama 42 laporan 44 laporan 46 laporan	38 laporan 30 laporan/10 kerjasama 40 laporan 31 laporan/ 10 kerjasama 42 laporan 44 laporan 46 laporan	38 laporan 30 laporan/10 kerjasama 40 laporan 31 laporan/ 10 kerjasama 42 laporan 44 laporan 46 laporan	PAKLN	37.358.749
8	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Kurikulum dan bahan ajar/modul diklat yang disusun atau disempurnakan Partisipasi lembaga/instansi penyelenggara diklat Peserta diklat	7 jenis diklat 3 lembaga 701 org	7 jenis diklat 3 lembaga 924 org	7 jenis diklat 3 lembaga 660 org	7 jenis diklat 3 lembaga 680 org	7 jenis diklat 3 lembaga 680 org	Pusdiklat	104.730.047

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : INSPEKTORAT JENDERAL
Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenakertrans
Hasil (outcome) : Tercapainya ketataan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur KKN
IKU Program : - Jumlah pengawasan bagi Inspektorat I, II, III dan IV

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan Pengawasan Inspektorat I	Tetelaksananya pemeriksaan dan peningkatan Kualitas hasil pengawasan	Rekomendasi hasil pemeriksaan Supervisi dan koordinasi pemeriksaan Rekomendasi hasil pemeriksaan kasus/khusus	300 Obrik	300 Obrik 24 Kali	300 Obrik 24 Kali	360 Obrik 24 Kali	370 Obrik 24 Kali	Inspektorat I	23.808.000
2	Peningkatan Pengawasan Inspektorat II	Tetelaksananya pemeriksaan dan peningkatan Kualitas hasil pengawasan	Rekomendasi hasil pemeriksaan Supervisi dan koordinasi pemeriksaan Rekomendasi hasil pemeriksaan kasus/khusus	300 Obrik	300 Obrik 24 Kali	300 Obrik 24 Kali	360 Obrik 24 Kali	370 Obrik 24 Kali	Inspektorat II	23.808.000
3	Peningkatan Pengawasan Inspektorat III	Tetelaksananya pemeriksaan dan peningkatan Kualitas hasil pengawasan	Rekomendasi hasil pemeriksaan Supervisi dan koordinasi pemeriksaan Rekomendasi hasil pemeriksaan kasus/khusus	300 Obrik	300 Obrik 24 Kali	300 Obrik 24 Kali	360 Obrik 24 Kali	370 Obrik 24 Kali	Inspektorat III	23.808.000
4	Peningkatan Pengawasan Inspektorat IV	Tetelaksananya pemeriksaan dan peningkatan Kualitas hasil pengawasan	Rekomendasi hasil pemeriksaan Supervisi dan koordinasi pemeriksaan Rekomendasi hasil pemeriksaan kasus/khusus	300 Obrik	300 Obrik 24 Kali	300 Obrik 24 Kali	360 Obrik 24 Kali	370 Obrik 24 Kali	Inspektorat IV	23.808.000

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal	Peningkatan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi	Dukungan pelayanan administrasi dan teknisnya lainnya (perencanaan program dan evaluasi, analisa hasil pengawasan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtangga)	255 Obrik	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	Ses. Itjen	133.478.000
			Koordinasi dari tindak lanjut hasil pengawasan		300 Obrik	300 Obrik	320 Obrik	320 Obrik		
			BASE LINE	37.500.000	41.200.000	45.320.000	49.850.000	54.840.000		
										228.710.000

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
Program : Penelitian dan Pengembangan Kementektrans
Hasil (outcome) : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kementektrans.
IKU Program : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi ketransmigrasian dan ketransmigrasian yang dijadikan bahan kebijakan

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000,-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, pengembangan model, sistem dan standar di bidang ketransmigrasian.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan jansos, serta pengawasan ketransmigrasian yang dijadikan rekomendasi/kebijakan	8 Lit/Bang	10 Lit/Bang	14 Lit/Bang	16 Lit/Bang	19 Lit/Bang	Puslitbang Ketransmigrasian	26.587,611
			Dukungan kegiatan pelayanan teknis kelibangan dan administrasi kelembagaan iptek penelitian dan pengembangan ketransmigrasian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
2	Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, pengembangan model, sistem dan standar di bidang ketransmigrasian	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan kawasan transmigrasi, serta bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/kebijakan	14 Lit/Bang	15 Lit/Bang	17 Lit/Bang	20 Lit/Bang	22 Lit/Bang	Puslitbang Ketransmigrasian	40.789,671
			Dukungan kegiatan pelayanan teknis kelibangan dan administrasi kelembagaan iptek penelitian dan pengembangan ketransmigrasian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah hasil kegiatan pengkajian dan penerapan teknik ketransmigrasian serta pengembangan masyarakat transmigrasi	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Puslitbang Ketranmigrasian	
			Dukungan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan balai pengkajian dan penerapan teknik produksi ketranmigrasian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
3	Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan	Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan: pangkalan data dan informasi ketenagakerjaan umum, bidang pelatihan dan produktivitas serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg		
			Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan: pangkalan data dan informasi ketenagakerjaan: pangkalan data dan informasi ketenagakerjaan umum, bidang hubungan industrial dan jamistik serta pengawasan ketenagakerjaan	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	26.396.247
			Terselenggaranya penyiapan, promosi, integrasi jejaring, dan pelatihan serta pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
			Dukungan manajemen, pelayanan administrasi dan teknis untuk kelembagaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	TOTAL BIAYA (000.-)
			KELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	
4	Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian	Tersedianya data dan informasi masyarakat dan kawasan transmigrasi	Jumlah data dan informasi bidang pembangunan kawasan transmigrasi	7 keg	7 keg	4 keg	4 keg	4 keg	Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian 29.512.749
			Jumlah data dan informasi bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	2 keg	2 keg	5 keg	5 keg	5 keg	
			Dukungan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi	Terselenggaranya pelayanan administrasi di lingkungan Balitro dan layanan dalam pengembangan sistem informasi dalam mendukung terselenggaranya sistem elektronik (E-GOVERNMENT) di lingkungan KEMENAKERTRANS	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya (perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kerumahantnggaan).	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat Balitro 163.403.722
			Dukungan terselenggaranya E-GOVERNMENT sistem informasi dan jaringan serta pengembangan kapasitas sumber daya informatika	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
BASE LINE				40.130.000	53.130.000	58.440.000	64.280.000	70.710.000	286.690.000

LAMPIRAN 2

ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
 Program : Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 Hasil (outcome) : Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
 IKU Program : Angka Peserta Pelatihan yang Kompeten

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan	228.332.000	235.493.000	223.422.395	246.602.000	305.795.381	1.239.644.776
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan lembaga pelatihan dan produktivitas	156.605.000	151.300.000	178.418.180	195.700.000	228.113.125	910.136.305
3	Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri	67.951.000	74.100.000	84.470.729	83.400.000	94.485.107	404.416.836
4	Peningkatan kompetensi Instruktur, PSM dan tenaga kepelatihan	52.162.000	64.600.000	60.095.174	73.800.000	76.467.280	327.124.454
5	Pengembangan dan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan	50.351.000	121.500.000	130.005.620	145.200.000	164.132.011	611.188.631
6	Pengembangan sistem dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	30.544.000	31.402.000	49.584.066	37.298.000	25.150.420	173.978.486
7	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Dijen Binalatlas	33.074.000	83.605.000	91.703.836	92.000.000	86.746.676	387.129.612
	JUMLAH	619.019.000	762.000.000	817.700.000	874.000.000	980.900.000	4.053.619.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
Program : Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Hasil (outcome) : Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
IKU Program : Jumlah fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN ('000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Peningkatan pengembangan pasar kerja	41.362.111	38.110.000	59.680.071	63.042.449	65.368.439	267.563.070
2	Penempatan tenaga kerja dalam negeri	48.874.933	33.238.000	26.685.557	60.497.619	53.734.347	223.030.456
3	Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri	108.178.299	89.930.000	85.653.238	115.391.937	127.216.473	526.369.947
4	Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja	155.326.455	362.960.000	371.623.951	393.639.157	424.280.010	1.707.829.573
	Peningkatan dan pengendalian penggunaan TKA di kawasan ekonomi khusus (KEK)	0	2.000.000	923.983	958.953	1.121.214	5.004.150
	Peningkatan dan pengembangan pasar kerja di kawasan ekonomi khusus (KEK)	0	9.000.000	923.983	958.953	1.121.214	12.004.150
5	Peningkatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing	10.713.851	8.721.000	9.303.156	13.495.485	10.018.850	52.252.342
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	60.488.409	61.005.000	67.164.095	81.985.842	78.952.694	349.596.040
7	Pengembangan model inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja	20.055.942	21.736.000	22.741.966	29.729.605	29.586.759	123.850.272
	JUMLAH	445.000.000	626.700.000	644.700.000	759.700.000	791.400.000	3.267.500.000

LOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN 2

Unit Eselon I : **DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**
TENAGA KERJA
Program : **Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial**
Tenaga Kerja
Hasil (outcome) : **Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial**
IKU Program : **Meningkatnya syarat-syarat kerja dan menguatnya kelembagaan HI**

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi	9.347.000	22.985.000	22.104.000	36.918.000	38.584.000	129.938.000
2	Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	51.300.000	43.436.000	45.048.000	74.048.000	86.000.000	299.832.000
3	Konsolidasi peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI	9.605.000	27.472.000	28.232.000	43.889.000	43.841.000	153.039.000
4	Pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja	8.685.000	29.584.000	30.048.000	36.048.000	36.000.000	140.365.000
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	42.413.000	117.203.000	105.808.000	140.967.000	178.125.000	584.516.000
	JUMLAH	121.350.000	240.680.000	231.240.000	331.870.000	382.550.000	1.307.690.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Program : Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Hasil (outcome) : Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
IKU Program : Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK 3)

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	24.475.524	27.336.031	81.000.000	78.721.200	89.429.000	300.962.155
2	Peningkatan penerapan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.279.121	4.273.481	16.100.000	12.759.700	31.047.833	69.460.135
3	Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	9.605.120	57.278.885	90.000.000	101.319.700	108.751.500	366.955.205
4	Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan	5.279.121	4.273.481	16.200.000	12.759.700	31.047.834	69.560.136
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	75.460.714	61.538.122	29.000.000	28.239.700	49.623.833	243.862.369
	JUMLAH	120.100.000	154.700.000	232.300.000	233.800.000	309.900.000	1.050.800.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 Program : Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 Hasil (outcome) : Terwujudnya Permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
 IKU Program : Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Facilitasi penempatan transmigrasi	64.638.892	81.163.583	75.204.750	82.622.068	85.035.410	388.664.703
2	Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi	435.805.713	447.818.803	504.171.868	557.355.110	659.407.966	2.604.559.460
3	Penyediaan tanah transmigrasi	32.609.694	34.491.372	42.053.593	41.610.735	35.304.431	186.069.825
4	Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi	18.881.610	19.975.374	23.801.306	24.029.736	14.024.485	100.712.511
5	Partisipasi masyarakat	22.134.787	23.432.612	27.187.373	28.246.415	18.439.832	119.441.019
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dijen P2KT	72.229.304	76.418.256	78.581.110	92.335.936	96.687.876	416.252.482
	JUMLAH	646.300.000	683.300.000	751.000.000	826.200.000	908.900.000	3.815.700.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
Program : Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Hasil (outcome) : Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.

IKU Program : Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi yang Berkembang

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN ('000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan	95.225.000	207.674.165	205.129.942	237.799.761	270.962.831	1.016.791.699
2	Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi	127.773.000	108.226.167	160.496.357	171.987.110	214.459.025	782.941.659
3	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat kawasan transmigrasi	13.375.000	145.142.167	157.554.239	167.822.522	181.537.291	665.431.219
4	Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi	85.116.000	44.454.167	20.900.957	19.245.365	10.936.245	180.652.734
5	Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	246.952.000	12.739.167	21.740.196	20.004.279	10.799.033	312.234.675
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	15.759.000	88.364.167	101.478.309	117.140.963	118.705.575	441.448.014
	JUMLAH	584.200.000	606.600.000	667.300.000	734.000.000	807.400.000	3.399.500.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : SEKRETARIAT JENDERAL
 Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 Hasil (outcome) : Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenakertrans
 IKU Program : Tertib dan lancarnya pelayanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemenakertrans

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN ('000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Peningkatan perencanaan program dan anggaran	14.250.125	12.465.719	12.932.952	16.727.987	14.900.444	71.277.227
2	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan	80.798.125	75.758.715	82.548.946	85.700.453	97.368.213	422.174.452
3	Peningkatan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian	10.147.675	15.016.533	15.007.480	13.112.996	11.925.747	65.210.431
4	Pembentukan, pembaruan dan penyelesaian masalah hukum	8.782.000	7.584.719	7.523.946	11.408.550	10.160.763	45.459.978
5	Peningkatan pengelolaan urusan deta usaha dan pelayanan umum	61.870.000	60.740.719	66.057.946	69.320.639	84.819.043	342.808.347
6	Peningkatan dan pengelolaan hubungan masyarakat	17.749.342	35.800.719	36.297.946	36.715.930	39.007.723	165.571.660
7	Peningkatan dan pengelolaan kerjasama luar negeri	7.670.000	5.402.719	6.263.946	10.120.574	8.502.510	37.959.749
8	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur	18.132.880	18.445.719	19.509.946	23.244.420	25.397.082	104.730.047
9	Peningkatan kualitas dan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	15.700.000	18.126.719	19.158.946	22.896.757	24.950.103	100.832.525
10	Penyusunan perencanaan tenaga kerja	4.899.853	5.657.719	15.197.946	19.251.694	22.368.372	67.375.584
JUMLAH		240.000.000	255.000.000	280.500.000	308.500.000	339.400.000	1.423.400.000

LAMPIRAN 2

**ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Unit Eselon I : INSPEKTORAT JENDERAL
Program : Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenakertrans
Hasil (outcome) : Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur KKN
IKU Program : Jumlah pengawasan Inspektorat Jenderal

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pengawasan Inspektorat I	3.900.000	4.290.000	4.719.000	5.190.000	5.709.000	23.808.000
2	Pengawasan Inspektorat II	3.900.000	4.290.000	4.719.000	5.190.000	5.709.000	23.808.000
3	Pengawasan Inspektorat III	3.900.000	4.290.000	4.719.000	5.190.000	5.709.000	23.808.000
4	Pengawasan Inspektorat IV	3.900.000	4.290.000	4.719.000	5.190.000	5.709.000	23.808.000
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	21.900.000	24.040.000	26.444.000	29.090.000	32.004.000	133.478.000
	JUMLAH	37.500.000	41.200.000	45.320.000	49.850.000	54.840.000	228.710.000

LAMPIRAN 2
ALOKASI ANGGARAN RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Unit Eselon I : BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
 Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian
 Hasil (outcome) : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kementerian.
 IKU Program : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasian yang dijadikan bahan kebijakan

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (000,-)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan	2.125.314	5.306.000	6.437.202	6.413.000	6.306.095	26.587.611
2	Penelitian dan pengembangan transmigrasian	3.726.647	8.006.000	9.099.351	9.680.000	10.277.673	40.789.671
3	Pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan	2.401.708	5.206.000	6.338.604	6.292.000	6.157.935	26.396.247
4	Pengelolaan data dan informasi transmigrasian	5.984.862	5.106.000	6.240.006	6.171.000	6.010.881	29.512.749
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Balifo	25.891.469	29.506.000	30.324.837	35.724.000	41.957.416	163.403.722
	JUMLAH	40.130.000	53.130.000	58.440.000	64.280.000	70.710.000	286.690.000

LAMPIRAN 3

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PROGRAM	UNIT KERJA	ALOKASI BASELINE (000.000.-)					TOTAL
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	619.019	752.000	817.700	874.000	980.900	4.053.619
2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	445.000	626.700	644.700	759.700	791.400	3.267.500
3	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	121.350	240.680	231.240	331.870	382.550	1.307.690
4	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	120.100	154.700	232.300	233.800	309.900	1.050.800
5	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	646.300	683.300	751.000	826.200	908.900	3.815.700
6	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	584.200	606.600	667.300	734.000	807.400	3.399.500
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemakertrans	Sekretariat Jenderal	240.000	255.000	280.500	308.500	339.400	1.423.400
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemakertrans	Inspektorat Jenderal	37.500	41.200	45.320	49.850	54.840	228.710
9	Penelitian dan Pengembangan Kemakertrans	Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi	40.130	53.130	58.440	64.280	70.710	286.690
TOTAL ANGGARAN KEMENAKERTRANS			2.853.599	3.423.310	3.728.500	4.182.200	4.646.000	18.833.609